

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Kawasan Pasifik Selatan adalah kawasan yang baru berkembang sejak tahun 1960-an, sehubungan dengan munculnya negara-negara baru merdeka. Terdapat 13 negara yang merdeka diantara tahun 1960-an sampai 1980-an yaitu Samoa, Kepulauan Cook, Nauru, Tonga, Fiji, Niue, Papua New Guinea, Solomon, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Kepulauan Marshall, dan Negara Federasi Mikronesia. Berdasarkan persamaan budaya, para ahli geografi membagi pulau-pulau di kawasan Pasifik Selatan ke dalam tiga wilayah budaya, yaitu Mikronesia, Melanesia, dan Polinisia. Barangkali persamaan antara negara-negara Pasifik Selatan dengan Indonesia adalah kedekatannya secara geografis yaitu berada di belakang punggung bangsa Indonesia. Yang paling menonjol adalah persamaan ras dan budaya Melanesia dengan penduduk asli di propinsi Papua Indonesia.

Secara geografis Papua terletak di ujung timur Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan berdekatan dengan Benua Australia serta diapit oleh Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian Papua mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.

Disini topik yang akan diangkat oleh penulis adalah mengenai

..... dari Pasifik

Selatan yaitu negara Vanuatu terhadap aspirasi merdeka yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat Papua sejak lengsernya rezim Soeharto selama 32 tahun yang mana banyak terjadi pengekangan kebebasan berpendapat dan pengekangan kebebasan untuk memperjuangkan kemakmuran wilayah termasuk masyarakatnya. Selama Soeharto berkuasa banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Penulis merasa tertarik mengambil topik tentang Vanuatu dikarenakan adanya pernyataan pemberian dukungan paling vokal dari pemerintah negara kecil ini terhadap perjuangan kemerdekaan Papua yang masih merupakan bagian dari kedaulatan NKRI dibanding dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Kegigihan kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua yang sangat berambisi untuk berdisintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga sangat menarik untuk dipelajari. Masyarakat Papua menuntut hak-haknya untuk merdeka dalam segala aspek kehidupan yang selama ini tidak pernah diperhatikan dan selalu terpinggirkan.

Dalam penyelesaiannya, pemerintah Indonesia berusaha mengupayakan jalan damai melalui perundingan dan pendekatan-pendekatan kooperatif, yang akhirnya memutuskan dikeluarkannya otonomi khusus bagi wilayah Papua. Tetapi kebijakan tersebut tidak menyurutkan niat masyarakat Papua untuk terus berjuang, dan simpati dunia internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua pun sudah mulai bermunculan, terutama dari Vanuatu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul penelitian
“MENGUATNYA DUKUNGAN NEGARA VANUATU TERHADAP

B. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Vanuatu sehingga mendukung perjuangan masyarakat Papua untuk lepas dari kedaulatan Republik Indonesia.
2. Untuk memberi gambaran tentang sepaik terjang perjuangan masyarakat Papua dalam upaya memerdekakan diri dan menuntut kembali hak-haknya dalam segala bidang yang dulu terabaikan.
3. Untuk menambah referensi informasi tentang Papua, negara Vanuatu dan kawasan Pasifik Selatan bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ingin mengkajinya lebih dalam.
4. Untuk melengkapi mata kuliah skripsi yang akan dijadikan syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Konflik internal yang terjadi antara masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia saat ini tengah menjadi pusat perhatian dunia internasional berkaitan dengan keinginan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari wilayah kedaulatan Indonesia. Komunitas internasional yang terdiri dari Amerika dan negara-negara sekutunya, Asia, dan negara-negara kepulauan Pasifik pada faktanya melihat bahwa

organisasi teroris melainkan perjuangan untuk memperoleh hak-hak yang dijamin dan diakui oleh hukum internasional maupun nasional, meskipun fakta lainnya adalah Papua masih merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2001, negara-negara yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik yaitu Australia, Selandia baru, PNG, Nauru, Vanuatu, Fiji dan lain-lain sepakat untuk mendukung lepasnya Papua dari Indonesia. Asumsi mereka, pemerintah Indonesia sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan dan hak asasi masyarakat lokal Papua. Dukungan diberikan juga berdasarkan solidaritas terhadap etnis Papua. Namun dari sekian banyak negara Pasifik Selatan hanya ada dua negara yang secara terbuka mendukung Papua merdeka yaitu Vanuatu dan Nauru.¹

Nama Vanuatu memang asing terdengar di telinga orang Indonesia. Negara kepulauan di Lautan Pasifik ini termasuk negara miskin yang dulunya dikenal dengan nama "Hebrida Baru". Negara Vanuatu sebagai perwakilan dari negara-negara Pasifik Selatan sangat prihatin dengan konflik yang terjadi antara gerakan kemerdekaan Papua dan pemerintah Indonesia sehingga berinisiatif menawarkan diri untuk menjadi mediator pembicaraan damai bagi kedua belah pihak yang bertikai dalam lingkungan yang netral. Vanuatu menyarankan bahwa tidak perlu ada paksaan campur tangan asing di masa yang akan datang. Vanuatu ingin menawarkan kesempatan kepada Indonesia agar dapat duduk bersama dengan delegasi Papua Barat untuk berdiskusi

Sekretaris Jendral PBB untuk memulai sebuah pemeriksaan atas keabsahan dari PEPERA tahun 1969.

Sejak kemerdekaannya di tahun 1980, Vanuatu tetap mempertahankan kekuatan kebijakan politik luar negerinya. Sudah sejak lama muncul dukungan terhadap gerakan kemerdekaan di wilayah Papua Barat, Timor-timur, Kaledonia Baru dan Tahiti. Pemerintah Vanuatu bahkan telah bertemu dengan sekjen PBB untuk membahas masalah Papua. Jika dilihat dari pernyataan resmi pemerintah Vanuatu atau lewat wakilnya di New York, benar bahwa negara-negara itu tetap menyatakan Papua sebagai bagian dari Indonesia karena PBB menganggap jajak pendapat di Papua Barat yang dilakukan tahun 1969 itu sah, tapi dibalik itu mereka juga nyata-nyata mendukung gerakan kemerdekaan Papua.

Pemerintah Vanuatu yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Barak Sope Tame Maatamate yang menjabat pada tahun 2004 mendesak PBB untuk bertanggung jawab secara moral dan politik terhadap kesalahan yang dibuatnya di masa lalu terhadap masalah Papua Barat.² Untuk menciptakan perdamaian dan keamanan yang abadi di Papua Barat, masalah penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan rakyat Papua Barat serta peninjauan kembali keterlibatan PBB dalam Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 harus menjadi perhatian utama program-program reformasi PBB. PBB harus bertanggung jawab secara kolektif untuk mengakhiri pelanggaran HAM dan penghancuran etnis yang terus berlangsung secara diam-diam selama ini.

Dalam pidatonya pada sesi ke-59 Persidangan Majelis Umum PBB pada tanggal 29 September di New York, Barak Sope menyampaikan bahwa:

“PBB harus konsisten dengan keputusan-keputusannya untuk mengakui dan menghargai hak-hak dasar rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Hal-hal yang sebenarnya terjadi pada saat berlangsungnya PEPERA harus dibuka dan disampaikan kepada saudara-saudara kami di Papua Barat, dan seluruh masyarakat internasional. PBB harus menghargai dan mengakui hak-hak rakyat Papua Barat sesuai dengan prinsip-prinsip dan keputusan-keputusan PBB itu sendiri. PBB harus mengambil tanggungjawab untuk memperbaiki citranya, membawa, serta menegakkan perdamaian yang abadi di Papua Barat”.³

Pimpinan delegasi Vanuatu juga mengkritik PBB karena kurang bertindak proaktif dalam menjawab masalah-masalah dunia termasuk masalah Papua Barat dan mendesak PBB untuk menciptakan program reformasi baru didalam sistemnya agar kepentingan negara-negara anggotanya dapat terpenuhi secara berimbang, karena tampak jelas bahwa PBB dewasa ini hanya melindungi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok negara anggota tertentu saja.

Pada saat yang sama, delegasi Vanuatu menyerang pemerintah Indonesia karena pendudukannya yang tidak sah atas Papua Barat dan tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematis serta mendesak Indonesia untuk menghargai dan mengakui hak-hak rakyat Papua Barat yang adalah rakyat sesama Melanesia untuk menentukan masa depannya sendiri. Bagi Vanuatu, sangat jelas

D. POKOK PERMASALAHAN

Dari fenomena yang terjadi dan telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yaitu: **“Mengapa Vanuatu Memberikan Dukungannya Kepada Papua?”**

E. KERANGKA DASAR TEORI

Permasalahan dalam studi ini pada dasarnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa suatu negara berlaku sedemikian rupa, atau kondisi apa yang membuat negara berlaku seperti itu dan bagaimanakah upaya yang dilakukan negara tersebut untuk mencapai tujuan itu. Oleh karena itu digunakan teori yang berkaitan dengan tema diatas. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam kebijakan politik luar negeri Vanuatu terhadap Papua, maka penulis menggunakan:

Teori Politik Luar Negeri

Didalam teori ini tergantung konsep “Tujuan Nasional”. Pengambilan keputusan luar negeri merupakan fokus penting dalam studi politik internasional dan bisa dipandang sebagai proses intelektual, proses psikologis dan proses organisasional. Politik luar negeri menurut S.L.Roy dalam buku *Diplomasi* (1991) telah mempunyai berbagai definisi antara lain sebagai “pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain”.⁴ Sedangkan Gibson (Roy, 1991: 31) dalam bukunya *The Road to Foreign Policy*, mendefinisikan sebagai “rencana

komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain. Politik luar negeri ditujukan pada peningkatan dan perlindungan kepentingan bangsa”.⁵

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, Politik Luar Negeri merupakan:

“Suatu strategi atau rangkaian tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan suatu negara vis a vis negara lain atau kesatuan internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan nasionalnya.”⁶

Dari definisi yang dikemukakan Plano dan Olton, terlihat ada beberapa unsur utama dalam politik luar negeri. Unsur-unsur tersebut adalah strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Menurut C.P.F. Luhulima (ASEAN Menuju Postur Baru, 1991 : 217)

Politik luar negeri suatu negara pada dasarnya merupakan alat untuk memperjuangkan dan mencapai kepentingan nasional negara itu. Ia merupakan kebijaksanaan dan strategi suatu bangsa untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang disusun atas dasar kepentingan nasional bangsa itu. Dengan demikian politik luar negeri suatu negara meliputi semua tindakan yang dijalankan penguasa negara untuk mempengaruhi berbagai keadaan dan perkembangan diluar batas-batas yuridiksinya, sehingga memungkinkan negara itu memperoleh keuntungan-keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasionalnya, atau

⁵ *Ibid*, hlm 31

meminimalisasi kerugian terhadapnya.⁷ Output kebijakan luar negeri biasanya merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan nasional, memecahkan masalah atau mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara lain.

Perilaku politik luar negeri dapat dikatakan ditentukan oleh konsepsi negara tersebut mengenai tujuan politik luar negerinya. Sejumlah orang yang berkelompok dalam suatu negara bangsa dan tipe-tipe unit politik yang sebagian besar hanya dapat dicapai atau ditemui oleh mereka dengan menerapkan suatu kebijakan luar negeri tertentu. Sebagian besar pemerintahan mempunyai tujuan-tujuan yang diusahakan melalui kegiatan berbagai tindakan dan merefleksikan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuannya.

Menurut Cecil V Crabb Jr (Coulombis dan Wolfe, *Introduction to International Relation: Power and Justice, 1978*), pada dasarnya politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan-tujuan nasional (*national objectives*) yang hendak dicapai dan sarana-sarana (*means*) untuk mencapainya.⁸

Menurut K.J. Holsti, konsep tujuan dapat diartikan sebagai suatu gambaran (*image*) keadaan masa depan atau sejumlah kondisi masa depan yang oleh pemerintah melalui pembuat kebijakan ingin diwujudkan dengan jalan mempunyai pengaruh di

⁷ William D. Coptin, *Pengantar Politik Internasional* (Suatu Telaah Teoritis), terj. Drs. Marsedes Marbun, Bandung : CV. Sinar Baru, 1982, hlm.32

⁸ Kutipan dalam Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Introduction to Inter*

luar negeri.⁹ Tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara juga dapat digolongkan dalam dua tipe. Suatu tujuan mungkin lebih bersifat global yang ditujukan untuk dunia secara keseluruhan. Sementara tujuan yang lain lebih bersifat regional, artinya ditujukan khusus untuk region tertentu diluar wilayah negara tersebut atau didalam wilayah negara itu sendiri.

Sementara itu elemen kedua dari politik luar negeri adalah sarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Ada beberapa teknik dalam perilaku politik luar negeri, yaitu bersifat verbal misalnya diplomasi dan propaganda dan berupa tindakan misalnya aktivitas ekonomi dan militer.¹⁰ Jadi politik luar negeri bertujuan mewujudkan tujuan, cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara, dengan kata lain politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Tujuan luar negeri Vanuatu secara regional dipengaruhi oleh komitmen negaranya sebagai pimpinan dan anggota *The Melanesian Spearhead Group* untuk memajukan dan melindungi identitas, nilai, tradisi dan hak-hak dasar dari orang-orang Melanesia di Asia Pasifik dan sarana yang digunakan bersifat verbal yaitu dengan cara-cara diplomasi sehingga berhasil membawa masalah Papua ke sidang PBB di New York pada tahun 2000.¹¹

⁹ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework For Analysis*, 3rd ed, Enelwood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1997, hlm. 139

¹⁰ J. Frankel, *Hubungan Internasional*, terj, Laila Hasyim, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). hlm. 121

¹¹ Pernyataan PM Vanuatu pada UN Millenium Summit, New York, 08 September

Meskipun Vanuatu bukan negara besar dan kaya, tetapi Vanuatu memiliki kedudukan istimewa bagi masyarakat Papua berdasarkan kesamaan ras Melanesia dengan ciri-ciri yang sama yaitu berkulit hitam dan berambut keriting sehingga menjadi tujuan utama untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan masyarakat Papua. Sebelumnya Vanuatu bersama negara-negara Pasifik Selatan lainnya menegaskan kedaulatan penuh Indonesia atas Papua, tetapi kemudian Vanuatu berbalik mendukung masyarakat Papua untuk berdisintegrasi dari wilayah NKRI.

Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton:

“The fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalize conception of those element that constitute the state most vital needs. They include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic wellbeing.”¹²

(Kepentingan nasional adalah faktor mendasar dan pokok yang menuntun para pembuat keputusan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara merupakan suatu konsep yang masih umum dan khas dari berbagai elemen yang merupakan keinginan sangat vital. Yang termasuk dalam elemen tersebut adalah mempertahankan kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer, dan ekonomi).

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan

melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.¹³ Pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional negara yang melaksanakannya. Pada dasarnya kebijakan luar negeri suatu negara merupakan suatu rangkaian strategi kegiatan dari tindakan yang terencana dan dikembangkan oleh pembuat keputusan di suatu negara terhadap negara lain atau terhadap entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi demi kepentingan nasionalnya.

F. HIPOTESIS

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesa yang dapat diambil dari penulisan ini adalah: Menguatnya dukungan Vanuatu lebih berdasarkan pada sentimen etnik sesama suku Melanesia terhadap masyarakat Papua dan jika Papua memperoleh kemerdekaannya, maka Vanuatu menginginkan Papua bergabung dalam "Regionalisme" baru di Pasifik Selatan.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas masalah ini adalah melalui library research (studi pustaka). Ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, menganalisa berbagai tulisan dari literatur, buku-buku,

jurnal, artikel maupun berita-berita dalam media cetak dan situs internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Penelitian dilakukan terutama sejak menguatnya dukungan dari negara Vanuatu terhadap perjuangan kemerdekaan Papua mulai tahun 2000 hingga perkembangan terakhirnya tahun 2004. Penulis dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan menggunakan bahan yang berada diluar kurun waktu tersebut jika memang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini:

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Dalam bab ini penulis menjelaskan Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Akan dijelaskan tentang gambaran umum negara Vanuatu yaitu latar belakang sejarah, budaya, dan geografis. Karakteristik politik dalam negeri Vanuatu, kondisi perekonomian Vanuatu, hubungan luar negeri Vanuatu dan isu tentang tuntutan kemerdekaan di Papua. Pada bab ini

Bab III Akan dijelaskan tentang kawasan Pasifik Selatan, pemerintahan Vanuatu yang pada perkembangannya kemudian menyatakan sikap memberi dukungan terhadap tuntutan kemerdekaan di Papua, desakan Pemerintah Vanuatu kepada PBB, peresmian kantor perwakilan diplomatik Papua di Vanuatu dan pembentukan Forum Kepulauan Pasifik

Bab IV Akan dijelaskan tentang alasan mengapa Vanuatu memberikan dukungan dan usaha-usaha Vanuatu untuk mendukung Papua dalam konteks internasional yang merupakan aplikasi dari Politik Luar Negerinya.